

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya

Ade Iskandar

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara

Eka Suaib

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)

H. Muh. Amir

Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity di Kabupaten Lampung Utara

Nia Janati

Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infrastructure Support* PNPM Provinsi Lampung

Selvi Diana Meilinda

Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yadi Lustiadi



# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### **Pembina**

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

### **Penanggung Jawab**

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

### **Ketua Penyunting**

Dr. Malik, M.Si

### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

### **Penyunting Pelaksana**

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

### **Tata Usaha**

Winda, SE

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

### **Alamat Redaksi**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### DAFTAR ISI

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya	1-13
<b>Ade Iskandar</b>	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara	14-29
<b>Eka Suaib</b>	
Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	30-46
<b>Malik</b>	
Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)	47-60
<b>H. Muh. Amir</b>	
Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis <i>Single Identity</i> di Kabupaten Lampung Utara	61-70
<b>Nia Janati</b>	
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Provinsi Lampung	71-87
<b>Selvi Diana Meilinda</b>	
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	88-101
<b>Yadi Lustiadi</b>	

**EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM RURAL  
INFRASTRUCTURE SUPPORT PNPM PROPINSI LAMPUNG  
OLEH  
SELVI DIANA MEILINDA, DOSEN ADMINISTRASI PUBLIK UBL**

---

**ABSTRACT**

*ate the pengarusutamaan gender in Rural Infrastructure Support Program The National Of Society Enableness in Floating. Pengarusutamaan Gender in program of Infrastructure Support Program The National Of Society Enableness draw to be evaluated by because as according to Loan Agreement, have to be strived by at least 40% deliberation competitor of at countryside storey;level and 30% from fasilitator is woman, This matter relate at Asian Development Bank Policy on Gender and Development year 1998. During the time not yet there is process the evaluation of pengarusutamaan gender in the program. ordinary aspect evaluated by is hit the effectiveness program from facet of expense and benefit. By using method evaluate the parsitipatory approach qualitative use 4 aspect in 3 cycle program namely aspect access the, participation, control and benefit of each in planning cycle, execution and evaluate as indicator.*

*Finding in field, in each;every step of activity of involvement composition of between woman and men not yet as according to goals. This matter because of in execution step, a lot of hard work in field claiming a lot of men role, whereas woman only participle personating and conduct the matter of like logistics preparation. In execution evaluate, no chance for society of men and woman in countryside to evaluate result of develop; builded infrastructure, this matter is caused by because system and procedure do not enable to conduct the internal evaluation, evaluate is only conducted by team from Asian Devepment Bank, center the, province, regency. While to evaluate about pengarusutamaan gender in program of Infrastructure Support Program TheNational Of Society Enableness in Floating, have never been conducted*

*Keyword: Evaluate the, Pengarusutamaan Gender, Program the Infrastructure Support Program The National Of Society Enableness*

**A. Latar Belakang**

Tulisan ini akan menyajikan evaluasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam program pembangunan, yakni program *Rural Infrastructure support* program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (RIS PNPM). Mengevaluasi pengarusutamaan gender dalam program pembangunan penting untuk dilakukan karena pembangunan nasional selama ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-

laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Kewajiban melaksanakan PUG di seluruh pemerintah daerah secara eksplisit sudah tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri nomor 15 tahun 2008. Instruksi ini sebagai bentuk komitmen atas ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention of Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang tertuang pada Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun

1984. Berkenaan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai amanat dalam instruksi presiden tahun 2000 untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di semua instansi pemerintah ini maka sangat penting untuk evaluasi pelaksanaan PUG dalam program pembangunan.

Manfaat dilaksanakan evaluasi PUG ini adalah agar pemerintah daerah dan pemerintah desa di propinsi Lampung termotivasi untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan dan PUG. Selain itu Pemerintah provinsi akan mendapatkan peta kemajuan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi PUG mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dengan mengevaluasi PUG berdasarkan pada 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu aspek dukungan politik/komitmen kelembagaan, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek sistem informasi, aspek sumber daya manusia, aspek analisis data dan aspek dukungan publik dan memperhatikan 4 (empat) aspek indikator kinerja PUG meliputi: aspek akses, aspek partisipasi, aspek kontrol dan aspek manfaat dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam program pembangunan (Pedoman PUG:2010).

Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan atau perbaikan akses pelayanan infrastruktur dasar perdesaan khususnya bagi masyarakat miskin pada daerah yang tertinggal. Adapun sasaran program adalah pertama tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Kedua, meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam

penyelenggaraan infrastruktur perdesaan.

Ketiga, tersusunnya rencana PJM Pronangkis pada tataran desa, keempat, meningkatnya jumlah penanganan desa tertinggal sejalan dengan RPJMN 2004-2009 dan 2009-2014. Kelima, meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan. Keenam, terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Pedoman Pelaksanaa RIS PNPM: 2009) dari keenam sasaran ini, diharapkan tujuan program dapat terwujud yang ditandai dengan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.

Mekanismenya, program ini memberikan bantuan dana sebesar 250 juta per desa yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur selama masa kegiatan yaitu 10-12 bulan. Proses pencairan dilakukan dalam 3 kali termin. Termin pertama, pada tahap persiapan, setelah dokumen PJM pronangkis di usulkan sampai tingkat satuan kerja pusat sebesar 100juta dengan pekerjaan 0%. Termin kedua, ketika laporan pertanggungjawaban dana termin pertama telah di sampai tingkat Satker Pusat dan pekerjaan telah 70% sebesar 100juta. Dan termin ketiga, setelah LPJ termin kedua sebesar 50 juta dengan pekerjaan 100%. Dana tersebut dikelola oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kader desa yang dibentuk melalui musyawarah desa di fasilitasi oleh fasilitator pemberdayaan dan teknis dari dinas PU Propinsi, kepala desa, dan tenaga ahli manajemen kabupaten (TAM Kab).

Ruang lingkup infrastruktur yang boleh dilakukan dalam rangka peningkatan

perekonomian meliputi pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, tambatan perahu. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan serta Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan, sarana pendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar ini, perekonomian masyarakat meningkat dan kemiskinan dapat di atasi (Pedoman Pelaksanaa RIS PNPM: 2009).

Dalam program RIS PNPM, pengarusutamaan gender menjadi komitmen antara lembaga donor (ADB) dengan kementerian Pekerjaan Umum. Dengan tujuan bahwa pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi menuntut juga peran kaum perempuan dalam tiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan program, hal ini dimaksudkan untuk (1) penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya (2) pemecahan masalah-masalah, termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan karena merekalah yang betul-betul merasakan masalah dan kebutuhannya. Keputusan yang diambil hanya oleh kaum laki-laki seringkali hanya berhubungan dengan dunia laki-laki dan tidak mempunyai sensitivitas kepada masalah perempuan. Bila memikirkan masalah perempuanpun seringkali dasarnya tidak kuat karena tidak mengalami masalahnya (3) Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

menjalankan tanggungjawab sosialnya sebagai manusia (4) Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga alam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (5) Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama (Materi Pelatihan Fasilitator Masyarakat:2009).

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pengarusutamaan Gender**

Istilah PUG atau dengan bahasa lain *gender mainstreaming* telah tercantum dalam Beijing Platform of Action pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa *Gender Mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, programs and projects*. Selanjutnya dalam melakukan pengarusutamaan gender paling tidak harus menyentuh 3 hal yaitu: (1) perspektif gender dalam perumusan kebijakan di setiap level; (2) menciptakan ruang dialog yang terus menerus untuk mengembangkan perspektif serta membangun jaringan dalam memperjuangkan keadilan; dan (3) membuat model-model pendidikan yang dapat membangun kesadaran, yang dimulai dari rumah tangga, sekolah dan pusat kehidupan masyarakat lainnya. Harus diakui bahwa pelaksanaan atau implementasi PUG di tingkat daerah berjalan agak lambat. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah percepatan antara lain dengan :

- a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran.

- b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

PUG pada aras pelaksanaan dilakukan dengan, *pertama* analisis gender. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidakadilan gender, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender serta pemecahan masalahnya. Kegiatan analisis gender ini meliputi: (1) melakukan identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam segala aspek; (2) melakukan identifikasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender; (3) menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; dan (4) menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksanaan PUG yang *kedua* yaitu melakukan upaya KIE tentang PUG pada instansi dan lembaga pemerintah daerah (Pedoman PUG:2010).

## **2. Pentingnya Pelaksanaan PUG di Daerah**

Diakui atau tidak bahwa proses pembangunan selama ini masih menyisakan banyak masalah berkenaan dengan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol perempuan dalam pembangunan. Berbagai problem yang terjadi antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yaitu 228 perseratus ribu kelahiran. Untuk AKI ini pemerintah tidak akan dapat mencapai target penurunan AKI pada tahun 2015 sesuai

dengan target MDGs. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Problem-problem yang lain yaitu masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan dalam wilayah domestik (KDRT) maupun kekerasan dalam wilayah publik. Berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah (Perda) masih banyak yang bias gender atau diskriminatif. Problem-problem buruh migran terutama perempuan yang mengalami kekerasan di luar negeri menambah deretan panjang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam badan-badan publik, ternyata jumlah angka partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah termasuk dalam proses musrenbangdes, musrenbangkam dan musrenbangkab, termasuk partisipasi perempuan di dalam lembaga legislatif yang masih jauh dari kuota minimal 40%. Demikian halnya dengan akses perempuan dalam bidang ekonomi, perempuan masih belum mendapatkan akses yang cukup untuk mewujudkan keadilan gender baik pada sisi akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat.

Oleh karena itu berkenaan dengan berbagai problem ketidakadilan gender ini maka setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan PUG dalam menyusun dan merancang program-program pembangunan. Selama ini program pembangunan yang dirancang masih netral gender atau bahkan bias gender, dalam arti kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi ataupun kekerasan berbasis gender. Para perencana pembangunan masih beranggapan bahwa program yang dirancang otomatis akan dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat baik kelompok perempuan maupun kelompok rentan (miskin, diffabel, anak-anak).

Secara khusus tujuan pelaksanaan PUG di daerah antara lain:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian
- c. pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

### 3. Kerangka Konseptual Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Bappenas: 2007). Adapun tujuan evaluasi adalah:

- a. menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat

diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan

- c. mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Pedoman PUG:2010).

### 4. Pendekatan Evaluasi

Terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1994), yakni: (1) evaluasi semu (2) evaluasi formal dan (3) evaluasi keputusan teoritis. Yang dimaksud evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang



terbukti dengan sendirinya (*self evident*) atau tidak kontroversial.

Evaluasi formal adalah (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan. Sedangkan evaluasi proses keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.

Dalam kumpulan latihan monev (Bappenas: 2007), jenis-jenis evaluasi menurut waktu pelaksanaan adalah:

- a. Evaluasi formatif:
  - Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
  - Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
  - Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
- b. Evaluasi summatif:
  - Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
  - Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
  - Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Sedangkan Jenis-jenis Evaluasi Menurut Tujuan:

- a. Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
- b. Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
- c. Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat, dan kelembagaan.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi sebuah program, kesalahan dalam menentukan atau memilih salah satu aspek ini dapat mengakibatkan evaluasi yang dijalankan tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan atau terjadinya pemborosan biaya yang tidak perlu.

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi: Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan evaluasi kadangkadang sulit untuk dilakukan. Apabila tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program, evaluasi harus dilaksanakan pada saat program masih berjalan. Apabila tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dampak program, maka kadang-kadang diperlukan waktu yang cukup lama dari akhir program sampai kemunculan dampak. Tetapi apabila evaluasi dilaksanakan lama setelah program berakhir, akan sulit bagi responden untuk mengingat detail pelaksanaan program.
- b. Biaya pelaksanaan evaluasi: Kegiatan evaluasi dapat memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi sebaiknya hanya dilakukan jika manfaat yang dapat

diperoleh dari hasil evaluasi akan lebih besar dari biayanya.

- c. Pertimbangan etika: Kadang-kadang untuk memperoleh hasil evaluasi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya perlu menggali informasi yang bersifat sensitif atau rahasia. Dalam hal ini integritas pelaku evaluasi untuk memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas dan kerahasiaan sangat diperlukan.
- d. Kelayakan politis: Keputusan untuk melanjutkan ataupun menghentikan suatu program dapat memiliki dampak politis. Hal ini harus dipertimbangkan sejak awal dalam perencanaan evaluasi, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan program setelah diperoleh hasil evaluasi.

Menurut Bappenas (2007) kriteria menilai hasil evaluasi, yakni :

- a. Memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kerangka acuan (*terms of reference* atau TOR).
- b. Cakupan yang relevan dan realistis untuk memperoleh gambaran yang mewakili mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan penerima manfaat program.
- c. Metode yang layak (*feasible*) dan memenuhi persyaratan dari segi ilmiah.
- d. Data yang dapat dipercaya dan akurat.
- e. Analisis yang layak dan tepat.
- f. Penarikan kesimpulan yang sah (*valid*) dan berdasarkan logika.
- g. Penyampaian yang jelas dengan menggunakan bahasa yang benar dan baik serta pemilihan kata-kata yang tepat dan lugas.

## 5. Indikator

Untuk melakukan pendekatan evaluasi, indikator merupakan alat yang berharga untuk memperoleh data dan informasi. Menentukan indikator sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan supaya hasil evaluasi mengurangi kecurigaan, meningkatkan komitmen, memperluas pengetahuan tentang tim evaluasi, meningkatkan kemungkinan bahwa hasilnya akan digunakan (Shackman:2009). Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG dalam program RIS PNPM ini terdapat 4 (empat) aspek yang harus digunakan sebagai indikator kinerja untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PUG. Adapun keempat aspek tersebut yaitu :

### a. Aspek Akses

Pengertian akses berkenaan dengan pertanyaan siapa menggunakan apa. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana akses laki-laki, perempuan dan kelompok marginal dalam pelaksanaan program RIS PNPM. Pada aspek ini harus dipastikan bahwa ada ruang yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapat informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kondisi perempuan sangat terbatas aksesnya, harus dipastikan quota 40% perempuan terpenuhi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan (rembug desa, musyawarah desa 1, musyawarah desa 2, penyusunan PJM RKM, musyawarah desa 3, pembangunan fisik infrastruktur, musyawarah desa 4 dan serah terima) . Pada tahap perencanaan, dipastikan bahwa pemberian kesempatan yang sama dalam rembug desa dan musyawarah desa baik laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi penyusunan perencanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan adalah dimana sejauhmana masyarakat, mitra kerja dan kelompok sasaran baik laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama atas sumber-sumber daya dan fasilitas-fasilitas serta pelayanan-pelayanan kegiatan. Sedangkan pada tahap evaluasi yaitu sejauhmana tingkat persebaran

informasi bagi desa sasaran baik laki-laki dan perempuan dan tingkat kemudahan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi PUG

b. Aspek Partisipasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan atau proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. memastikan partisipasi perempuan dalam program (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) minimal 40%, diantaranya pemberian peluang yang sama bagi peserta rembug desa dan musyawarah desa baik laki-laki dan perempuan dengan melibatkan minimal 40% perempuan untuk ikut serta dalam perencanaan kegiatan, sejauhmana para masyarakat desa sasaran baik laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dengan melibatkan minimal 40% perempuan termasuk tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan minimal 40% perempuan.

c. Aspek Kontrol

Aspek kontrol ini berkaitan dengan siapa pengambil keputusan, siapa yang menggunakan sumber daya, apa saja sumber daya yang digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Dalam aspek kontrol ini, harus dipastikan bahwa kelompok rentan (kelompok perempuan, kelompok miskin, kelompok anak-anak dan kelompok diffabel) memiliki kontrol terhadap program (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) termasuk

anggaranannya. Pada tahap perencanaan dipastikan terdapat pemberian kesempatan yang sama bagi peserta rembug desa dan musyawarah desa baik laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumber daya dan mempunyai kontrol yang mandiri dalam menentukan kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan maupun adanya rancangan kegiatan secara eksplisit menuliskan *output* dan *outcome* dengan memperhatikan akses manfaat untuk keadilan dan kesetaraan gender. Di bagian evaluasi dipastikan apakah ada perubahan jumlah kegiatan yang menggunakan perspektif gender dari tahun ke tahun (*base line*) dan sejauhmana kinerja kegiatan telah responsif gender.

d. Aspek Manfaat

Indikator kinerja pengarusutamaan gender berujung pada sejauhmana manfaat dari infrastruktur yang terbangun. Untuk menilai apakah infrastruktur tersebut bermanfaat perlu dilihat sejauhmana prakondisi PUG dan komponen kunci PUG telah ada sejauhmana perencanaan kegiatan memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan, maupun sejauhmana program-program yang dilaksanakan bermanfaat bagi kelompok sasaran baik laki-laki dan perempuan sejauhmana pelayanan yang diberikan memberi kemudahan bagi kelompok sasaran yang membutuhkan. Kesemuanya untuk mengukur bagaimana tingkat pencapaian IPG dan GDI.

Selanjutnya keempat aspek tersebut dapat dijabarkan dalam siklus program sebagai berikut :

No	Siklus	Aspek	Indikator
1	Perencanaan	Akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya pemberian kesempatan bagi kaum perempuan untuk memberi masukan dalam perencanaan program RIS PNPM.</li> <li>Adanya kondisi yang diciptakan (waktu, tempat) sehingga dalam perencanaan dapat melibatkan minimal 40% perempuan dalam perencanaan program RIS PNPM.</li> </ol>

			3. Adanya akses bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel) untuk memberikan input dalam perencanaan program RIS PNPM.
		Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterlibatan aktif kaum perempuan di dalam perencanaan program RIS PNPM.</li> <li>2. Adanya jumlah partisipasi perempuan sebesar 40% dalam perencanaan program RIS PNPM.</li> <li>3. Program yang direncanakan sudah mempertimbangkan partisipasi perempuan dalam program RIS PNPM.</li> </ol>
		Kontrol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data terpilah gender tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Adanya hak kontrol bagi laki-laki dan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran</li> <li>3. Adanya hak kontrol bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel) dalam perencanaan dan penganggaran</li> </ol>
		Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam perencanaan program RIS PNPM.</li> <li>2. Adanya peningkatan jumlah usulan pekerjaan fisik terutama bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak)</li> <li>3. Adanya pernyataan bahwa kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) menjadi sasaran dari infrastruktur yang telah direncanakan</li> <li>4. Ketersediaan data terpilah gender dalam penyusunan yang memberi manfaat bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) di desa sasaran</li> <li>5. Adanya indikator kinerja gender dalam output program RIS PNPM</li> <li>6. Adanya indikator kinerja gender dalam <i>outcome</i> program RIS PNPM</li> </ol>
2	Pelaksanaan	Akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur</li> <li>2. Adanya keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana khusus yang menunjang kebutuhan kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>4. Penciptaan situasi sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada sehingga kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel) dapat mengakses kegiatan yang dilaksanakan</li> </ol>
		Partisipasi	1. Adanya pertimbangan komposisi gender dalam

			<p>pelaksanaan program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peran strategis bagi perempuan sebagai pelaksana kegiatan</li> <li>Adanya keterlibatan kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
		Kontrol	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya hak kontrol bagi laki-laki dan perempuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggaran</li> <li>Adanya kesesuaian antara perencanaan sebelumnya dengan pelaksanaan kegiatan dan ketepatan sasaran terutama pada kelompok rentan (perempuan/miskin/ diffabel/anak-anak)</li> <li>Adanya kontrol dari pemangku kepentingan terhadap kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan termasuk anggarannya?</li> <li>Adanya hak kontrol bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggaran</li> </ol>
		Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan indeks pengarusutamaan gender dibanding tahun sebelumnya</li> <li>Adanya pemenuhan kebutuhan strategis dan praktis bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffable/anak-anak) yang berdampak pada peningkatan kesetaraan gender</li> </ol>
3	Evaluasi	Akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses evaluasi dengan memperhatikan quota 40% bagi perempuan</li> <li>Adanya kesempatan bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) terlibat dalam evaluasi kegiatan</li> <li>Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) dalam evaluasi kegiatan</li> </ol>
		Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya komposisi gender dalam evaluasi kegiatan</li> <li>Adanya upaya mendorong kaum perempuan yang terlibat dalam proses evaluasi kegiatan untuk berpartisipasi aktif</li> <li>Adanya keterlibatan kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) dalam evaluasi kegiatan</li> </ol>
		Kontrol	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya hak kontrol bagi Laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan</li> <li>Adanya kesempatan bagi kelompok rentan (perempuan/miskin/diffabel/anak-anak) untuk terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan termasuk anggarannya</li> <li>Adanya kemudahan akses bagi para pemangku</li> </ol>

		Manfaat	<p>kepentingan terhadap hasil evaluasi kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan kapasitas sensitifitas gender bagi pelaksana kegiatan baik laki-laki dan perempuan</li> <li>2. Tingkat ketercapaian indikator gender pada output dan outcome dalam PJM RKM</li> <li>3. Adanya dampak peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan/kelompok miskin/kelompok diffabel dalam program yang telah dilaksanakan</li> </ol>
--	--	---------	--

Sumber: Diadopsi dari panduan evaluasi PUG:2010, dengan perubahan seperlunya.

### C. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi PUG program RIS PNPM ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan metode partisipasi (pengalaman penulis menjadi fasilitator masyarakat beberapa bulan silam), yaitu cara keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dalam program atau strategi yang memungkinkan untuk menumbuhkan rasa memiliki. Penerapan metode ini untuk membangun kebersamaan dari perspektif masyarakat dan menjadikan kegiatan lebih berkelanjutan. Sementara kegunaannya untuk membangun proses belajar, identifikasi problem dan pemecahan, evaluasi implementasi dan membangun pengetahuan serta kemampuan untuk memberdayakan masyarakat. Metode ini memiliki kelemahan dan keunggulan, keunggulannya menguji isu yang relevan dengan keterlibatan pemain kunci dalam proses. Membangun kemitraan dan kepemilikan lokal. Mengembangkan pembelajaran lokal, kapasitas manajemen dan ketrampilan. Sedangkan kelemahannya kadang kurang obyektif. Memerlukan waktu yang panjang karena berorientasi proses musyawarah mufakat. Bisa muncul dominasi dari kelompok atau orang yang lebih kuat sehingga bisa melenceng dari semangat kebersamaan (Slide Metode dan Teknik Evaluasi:2011). Meskipun satu pendekatan dapat berfungsi untuk memandu evaluasi, ada kemungkinan bahwa beberapapendekatan digunakan ketika melakukan

evaluasi (Bledsoe &Graham:

2005; Christie: 2003 dalam Kundin: 2010).

Selain menggunakan metode partisipasi, untuk menguji tingkat objektivitas data juga diperoleh dengan menelpon 2 orang tenaga ahli manajemen kabupaten, 8 orang fasilitator masyarakat untuk 16 desa sasaran.Hal ini dilakukan karena gambaranya evaluator harus berinteraksi dengan program stakeholder untuk menarik keluar dari program teori mereka (Hansen dan Vedung: 2010). Data yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif yaitu data yang berupa deskripsi tentang sebuah fenomena. Selanjutnya agar data dari pelaksanaan evaluasi lebih lengkap dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, maka data-data yang dikumpulkan bersifat primer dan sekunder.

### D. Pembahasan

Program RIS PNPM menindaklanjuti pengarusutamaan gender dengan melibatkan 40% perempuan dalam setiap tahapan kegiatan perperiode program mulai dari tahap perencanaan sampai pasca pelaksanaan fisik. Tindakan konkrit tersebut adalah mewajibkan kehadiran 40% perempuan yang dibuktikan dalam presensi kehadiran rembug desa, musyawarah desa 1, musyawarah desa 2, musyawarah desa 3, dan musyawarah desa 4. Genderdan kesetaraansosial adalah proses bersikap adil pada perempuan dan pria. Untuk menjamin keadilan, harus ada langkah-langkah untuk mengganti keadaan merugikan historis dan sosial yang

membuat pria dan perempuan tidak dapat berkarya dalam bidang-bidang yang sebanding (*Status of Women, Canada, 1996*). Gender dan kesetaraan sosial adalah proses yang menghasilkan persamaan hak sosial.

Fasilitator Masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender. Fasilitator masyarakat harus mampu mengajak kelompok perempuan untuk lebih berperan terutama pada kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan keluarga, seperti infrastruktur air minum dan sanitasi. Peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan dapat dilakukan pada:

1. Pertemuan dengan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk dalam setiap musyawarah desa
2. Pertemuan dengan kelompok perempuan (apabila diperlukan dengan mendasarkan pada hasil penyiapan masyarakat)
3. Keanggotaan OMS yang terpilih harus beranggotakan minimal 40% kaum perempuan
4. Peningkatan peran serta perempuan di dalam menyusun PJM Pronangkis dan RKM, terutama di dalam penentuan infrastruktur yang akan dibangun
5. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan hak dengan laki-laki di dalam tahap pelaksanaan pekerjaan fisik;
6. Peningkatan peran serta perempuan di dalam merencanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

Dalam pelaksanaan program, sesuai dengan *Loan Agreement*, harus diupayakan paling tidak 40% peserta musyawarah pada tingkat desa dan 30% dari fasilitator adalah wanita, Hal ini mengacu pada ADB *Policy on Gender and Development 1998*.

## 1.Siklus Perencanaan

Kondisi geografis di desa sasaran antar dusun dalam satu desa sangat berjauhan-jauhan, sehingga menyulitkan kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam tahapan rembug desa ataupun musyawarah desa.

Kondisi yang diciptakan untuk melibatkan kaum perempuan dalam acara rembug desa ataupun musyawarah desa adalah inisiatif dan peran dari fasilitator masyarakat untuk mendengarkan suara kaum wanita bersuara ketika para fasilitator mendatangi aktivitas-aktivitas pengajian kelompok-kelompok perempuan di desa sasaran. Akan tetapi karena tidak ada partisipasi dan tidak hadir dalam rembug desa dan juga musyawarah desa, suara dan juga harap kaum perempuan terhadap program RIS PNPM yang telah dihipunkan oleh para fasilitator tidak diikutsertakan. Akan tetapi ada kondisi lain yang sengaja diciptakan untuk memberikan kesempatan keterlibatan kaum pria dan juga wanita serta para pemuda yaitu acara rembug desa dan musyawarah desa dilakukan dengan sengaja pada malam hari, agar tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan kaum pria dan juga wanita.

Kelompok rentan, baik perempuan maupun laki-laki di desa sasaran diberi kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan usulannya akan tetapi oleh kepala desa acara rembug desa dan juga musyawarah desa dalam menentukan struktur kepengurusan organisasi masyarakat setempat (OMS) telah di rancang sedemikian rupa untuk menghindari konflik. Nama-nama kepengurusan telah ditentukan sendiri, karena mengingat diwajibkan adanya keterlibatan perempuan sebanyak 40% dalam kepengurusan, maka oleh kepala desa, para kaum perempuan tersebut ditunjuk tanpa memperhatikan kapasitas untuk mengelola organisasi yang nantinya

akan mengurus administrasi, anggaran dan pelaksanaan fisik di lapangan.

Dalam hal partisipasi atau kehadiran kaum perempuan dan laki-laki dalam rembug desa atau musyawarah desa didominasi oleh kehadiran kaum laki-laki. Dalam proses pembuatan dokumen rencana kerja masyarakat (RKM) dan program jangka menengah (PJM), komposisi sasaran selalu menyertakan keterwakilan 40% untuk kaum perempuan. Akan tetapi, karena keterbatasan sumberdaya laum perempuan yang melek huruf dan penggunaan sarana-dan prasarana, partisipasi perempuan dalam pembuatan dokumen masih didominasi oleh peran serta dari fasilitator masyarakat bersama dengan organisasi masyarakat setempat yang telah dibentuk saat musyawarah desa pertama.

Selanjutnya mengenai hak kontrol bagi kelompok rentan baik perempuan, masyarakat miskin, difabel dan anak-anak serta kaum pria mendapatkan informasi tentang perkembangan program RIS PNPM di desa sasaran diperoleh dari papan informasi yang terdapat pada sekretariat OMS, selain itu secara tidak formal perkembangan program RIS PNPM menjadi perbincangan baik laki-laki maupun perempuan ketika berada di masjid, warung-warung, ladang, bahkan ketika bertamu. Masyarakat desa baik laki-laki atau perempuan memiliki hak kontrol terhadap program, akan tetapi terkadang hanya sebatas obrolan tanpa adanya advokasi lebih jauh. Dari aspek manfaat, rencana kegiatan yang disusun oleh masyarakat bermanfaat tidak hanya untuk kaum pria tetapi juga untuk kaum wanita. Adapun rencana kegiatan infrastruktur yang dibangun misalnya adalah saluran air bersih. Tentu saja kegiatan infrastruktur ini sangat bermanfaat, karena kaum perempuan banyak membutuhkan air bersih untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Dalam proses penyusunan PJM RKM desa, data terpilah gender diprioritaskan dalam presensi kehadiran ketika rembug desa, musyawarah desa, dan juga keterwakilan perempuan dalam komposisi struktur organisasi masyarakat setempat (OMS), dan kesemua itu terlampir menjadi satu kesatuan dalam proses pengajuan PJM RKM. Hal ini juga menjadi perhatian pemda dan tenaga ahli manajemen kabupaten (TamKab) untuk selalu mengecek jumlah keterwakilan tersebut. Sementara itu mengenai output dan outcome dalam dokumen PJM RKM yang disusun tidak memasukkan indikator kinerja gender yang terpenting dalam dokumen PJM RKM adalah partisipasi yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta rembug desa dan juga musyawarah desa, apakah memenuhi kuota 40% perempuan atau tidak. Serta keterwakilan perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan OMS desa sasaran tersebut.

## **2. Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pelaksanaan**

Penyelenggaraan Program RIS-PNPM Mandiridilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait dari tahap persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan fisik, pengendalian, sampai dengan serah terima infrastruktur serta pemanfaatan dan pemeliharannya. Dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: (a) Masyarakat aktor utama penyelenggara kegiatan, sedangkan konsultan pendamping dan aparat pemerintah berperan sebagai fasilitator, dan (b) masyarakat miskin dan kelompok perempuan didorong untuk berperan-serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan sarannya dibutuhkan kegiatan persiapan



yang matang dan dapat diketahui serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan sebagai perencana, pelaksana dan pemanfaat. Terkait dengan hal itu, perlu ditumbuh kembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku tentang apa, mengapa, dan bagaimana dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi secara berjenjang, pemberdayaan serta kampanye penyadaran publik merupakan kegiatan awal yang menjadi tolok ukur pencapaian keberhasilan program. Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat tidak berarti hanya menyerahkan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab dan hak serta kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang akan diambil serta mau untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Setelah sosialisasi dilakukan sampai dengan tingkat desa, masyarakat melaksanakan perencanaan atas jenis infrastruktur yang disepakati. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari identifikasi permasalahan, penyusunan PJM Pronangkis 3 (tiga) tahun, penentuan usulan, asistensi dan verifikasi, finalisasi usulan, perencanaan teknis, dan penyusunan anggaran. Dalam Program *Rural Infrastructure Support-PNPM (RIS-PNPM) Mandiri*, tahap ini sepenuhnya dilaksanakan pada tataran masyarakat dengan dukungan pemerintah. Hasil perencanaan kemudian diverifikasi dan dikonsolidasi secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, dengan demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dipantau

dan pendanaan yang tumpang tindih dapat diminimalkan. Rencana yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisik yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat secara luas diharapkan turut berperan serta aktif dalam pelaksanaan, baik sebagai pelaksana ataupun sebagai pengawas. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dapat diwujudkan.

Dari semua tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat desa diberi akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif. Pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat, dan jumlah tenaga kerja, jadwal waktu pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh pelaksana. Kondisi yang diciptakan di lapangan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan pembangunan adalah masyarakat setempat baik laki-laki atau perempuan dengan upah per Harian Orang Kerja (HOK), sehingga pelaksanaan fisik ini juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dari segi finansial dan menambah pendapatan. Hal ini memperlihatkan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk urusan pekerjaan berat kaum perempuan tidak terlibat banyak. Dalam pelaksanaan fisik di lapangan, perempuan berperan dalam pengadaan barang dan jasa, membantu mengkoordinasikan, membantu menyediakan konsumsi harian pekerja, dan membantu menyediakan bahan material seperti pasir, batu, dan kerikil yang mereka kumpulkan secara bertahap.

Dari aspek kontrol dalam siklus pelaksanaan, masyarakat dapat bisa mengakses kesesuaian antara rencana yang telah ditentukan dalam musyawarah dan dokumen PJM RKM dengan sasaran

pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dibangun. Hal ini disebabkan karena dokumen PJM RKM tidak secara luas dipublikasikan. Selain itu, Dalam tahap pelaksanaan ini seharusnya tahapan yang penting, bagi masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk mengendalikan (a) Kualitas Bahan dan Material (b) Mutu dan Volume pekerjaan (c) Keuangandan (d) Sumbangan Masyarakat. Para stakeholder dapat melakukan kontrol terhadap kesesuaian rencana dengan pelaksanaan termasuk anggarannya karena OMS berkewajiban menyampaikan informasi dalam bentuk penempelan papan informasi dan pemasangan papan proyek.

Penempelan informasi ini dilakukan oleh OMS yang meliputi informasi tentang RKM, hasil musyawarah desa dan rembug warga, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya. Penempelan informasi melalui papan pengumuman ditempatkan di lokasi strategis, misalnya di kantor desa/dusun, masjid, gereja, balai pertemuan dan lainnya, dengan bentuk dan ukuran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Penempelan informasi dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali. Papan proyek memuat informasi tentang nama pelaksanaan kegiatan, jenis dan volume infrastruktur yang dibangun, pagu dana untuk setiap jenis kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Papan proyek ditempatkan di lokasi kegiatan yang mudah terlihat oleh masyarakat. Kondisi seperti itulah yang memungkinkan baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan fisik infrastruktur yang dibangun.

Dari aspek manfaat, kebutuhan

strategis yang terpenuhi bagi kelompok rentan baik laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur ini ini seperti Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan titian dan jembatan perahu infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, berupa irigasi perdesaan, Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan serta akses menuju pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Sedangkan kebutuhan praktis bagi kelompok perempuan adalah pembangunan jalan sebagai pembuka akses dengan dunia luar, pembangunan jamban umum, pembangunan sarana air bersih dan infrastruktur kesehatan lainnya.

### **3. Pengarusutamaan Gender dalam Evaluasi Program**

Evaluasi program RIS PNPM adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatif tindak turun tangan selama pelaksanaan. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara keseluruhan, berdasar penilaian indikator-indikatornya. Indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Peningkatan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin di perdesaan terhadap infrastruktur dasar. Indikator yang dievaluasi adalah jumlah masyarakat desa sasaran khususnya masyarakat miskin sebagai penerima manfaat langsung pembangunan infrastruktur.
- b. Terbentuknya lembaga pelaksana program (OMS) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RIS-

PNPM Mandiri. Indikator yang dievaluasi adalah jumlah desa sasaran yang memiliki lembaga pelaksana program (OMS) serta dinilai mampu dan berhasil melaksanakan kegiatan RIS–PNPM Mandiri sesuai dengan tugasnya

- c. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun. Indikator yang dievaluasi adalah jumlah desa sasaran yang memiliki Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), memiliki rencana Operasi dan Pemeliharaan, dan memiliki rencana pendanaan pemeliharaan infrastruktur terbangun. Selain itu, terbentuknya rencana pembinaan yang akan dilakukan pihak kabupaten baik berupa rencana bantuan teknis atau rencana bantuan pendanaan.

Lokasi dan waktu pelaksanaan evaluasi tidak bisa akses masyarakat secara luas, karena pelaksanaan evaluasi program dilakukan oleh tim dari evaluator tingkat pusat, propinsi dan juga kabupaten. Hal itu juga menjadi hambatan bagi kaum perempuan ataupun laki-laki di desa sasaran untuk terlibat dalam proses evaluasi program. Sehingga tidak pula memperhatikan tingkat partisipasi 40% kaum perempuan. Seharusnya masyarakat secara luas dapat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan termasuk anggarannya, akan tetapi akses menuju ke sana tidak diberikan dan tidak ada mekanisme formal. Yang mengevaluasi adalah auditor dari ADB, dan dinas PU Propinsi. Untuk anggarannya di evaluasi oleh tim dari BPKP. Begitupun juga hasil evaluasi, tidak dapat diakses oleh semua stakeholder. Namun, dari aspek manfaat, bentuk-bentuk peningkatan kemampuan bagi masyarakat bahwa masyarakat mampu membangun infrastruktur

perdesaan dengan mengandalkan sumberdaya alam yang ada di desa mereka masing-masing. Masyarakat desa baik perempuan maupun laki-laki juga mampu menentukan kebutuhan mereka dan mampu menyusun dokumen rencana kerja serta program jangka menengah yang juga berguna untuk pembangunan desa.

#### **D. Penutup**

- a. Pengarusutaman gender dalam program RIS PNPM telah mengarusutamakan gender sesuai dengan *Loan Agreement*, harus diupayakan paling tidak 40% peserta musyawarah pada tingkat desa dan 30% dari fasilitator adalah wanita, Hal ini mengacu pada *ADB Policy on Gender and Development* (1998). Akan tetapi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program, keterlibatan perempuan hanya sebagai simbol untuk memenuhi kesepakatan tersebut tanpa adanya peran yang lebih lanjut sesuai dengan kapasitas kaum perempuan di desa sasaran. Temuan di lapangan, dalam setiap tahapan kegiatan komposisi keterlibatan antara perempuan dan laki-laki belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan dalam tahapan pelaksanaan, banyak pekerjaan-pekerjaan berat di lapangan yang menuntut banyak peran laki-laki, sementara perempuan hanya berperan sebagai partisipan dan melakukan hal seperti penyiapan logistik.

- b. Dalam pelaksanaan evaluasi, tidak ada kesempatan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan di desa untuk mengevaluasi hasil infrastruktur yang terbangun, hal ini disebabkan karena sistem dan prosedur tidak memungkinkan untuk melakukan

- evaluasi internal, evaluasi hanya dilakukan oleh tim dari ADB, pusat, propinsi, kabupaten. Sedangkan untuk evaluasi tentang pengarusutamaan gender dalam program RIS PNPM di Lampung, tidak pernah dilakukan.
- c. Evaluasi pengarusutamaan gender dalam program RIS PNPM di Lampung ini memiliki keterbatasan data sekunder, serta bias objektifitas. Data-data deskripsi banyak diperoleh dari hasil partisipasi penulis secara langsung ketika terlibat aktif dalam program RIS PNPM sejak tahun 2009-2010. Untuk menghindari disparitas subjektifitas, penulis mencoba mengonfirmasi data dengan Tenaga Ahli Manajemen (TAMKab) dan diskusi rekan sejawat dengan beberapa fasilitator masyarakat yang langsung mendampingi *loan agreement* keterlibatan 40% perempuan di desa sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas.2007. *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi. Program program kemiskinan*. Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas. Jakarta.
- Hansen, Morten Balle and Vedung, Evert. 2010. *Theory-Based Stakeholder Evaluation*. Sage Publication. Amerika.
- Kundin, Delia M. 2010. *A Conceptual Framework for How Evaluators Make Everyday Practice Decisions*. Sage Publication. Amerika.
- Pemprov DIY. *Pedoman Pelaksanaan PUG*. ADB loan No. 1964-INO. Yogyakarta.
- Shackman, Gene. 2009. *The Global Social Change Research Project*. Cooperative Extension. University of Wisconsin,.
- Widaningrum, Ambar. 2011. *Metode dan Teknik Evaluasi*. Bahan kuliah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Pascasarjana MKP FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- RIS PNPM mandiri. 2009. *Pedoman Pelaksanaan*. Jakarta.
- Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA. Adalah Dosen FISIP, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bandar Lampung.

ISSN : 2443-1214

**e-JKPP**

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

**Diterbitkan Oleh :**  
**Program Pascasarjana**  
**Magister Ilmu Administrasi**  
**Universitas Bandar Lampung**

